



ANALISIS PENERAPAN SIMAPAN PADA KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Ahmad Zidan¹, Tri Hesti Utamingtyas², Gentiga Muhammad Zairin³
^{1, 2, 3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This Study analyze the implementation of SIMAPAN BKPM at Ministry of Investment and Downstream and its contribution to enchancing trasnparency, accountability, and effectiveness in state budget management in support of Sustainable Development Goals (SDGs) 16. This research used a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews with four key informant that involved in budget management that works in Finance Division. Data were collected through interviews, limited observation, and analysis of internal documents and relevant regulations. The findings show that SIMAPAN BKPM strengthens transparency through real-time monitoring of SPP status, enchances accountability through a multi-layer verification mechanism between verifcator and PPSPM, anf supports effectiveness of the budgemt disbursement process. However, the system has not fully suppported public information disclosure because it is used for internal purposes. Overall, SIMAPAN BKPM contributes positively to the achievement of SDGs 16, particulary in strengthening effective, accountable, and transparent institutions.

Keywords: *Accounting Information System, Transparency, Accountability, SDG 16, Good Governance.*

How to Cite:

Zidan, A., Utamingtyas, T. H., & Zairin, G. M., (2025). Analisis Penerapan SIMAPAN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Vol. 6, No. 3, hal 508-513.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik merupakan suatu pondasi utama dalam mewujudkan negara yang efektif, akuntabel, transparan, dan memiliki daya saing. Dalam Konteks sektor publik, *Good governance* terus berkembang menjadi indikator penting dalam pengelolaan pemerintah yang modern. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas menjadi landasan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2022).

Dilansir dari data survei kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang dirilis oleh indikator.co.id, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk Presiden mengalami penurunan sebesar 0,8% antara akhir tahun 2023 dengan awal tahun 2024, survei ini dilakukan dengan mendata penegakan kasus korupsi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Penurunan tren terjadi karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan terungkap dari tahun ke tahun. (Indikator.co.id, 2024)

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai agenda pembangunan jangka panjang secara global yang mencakup 17 tujuan. Sebagai komitmen, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Salah satu tujuan yang relevan dalam konteks tata kelola pemerintah adalah SDG 16, yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan (UNDP, 2020)

SIMAPAN BKPM dikembangkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara secara internal. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Astuti et al. (2024). SIMAPAN BKPM tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai alat pengawasan internal yang mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem ini juga selaras dengan teori agensi yang menjelaskan mekanisme pengawasan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah), hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Maria & Halim. (2021) yang menekankan bahwa penerapan prinsip *good governance* yang kuat seperti transparansi dan akuntabilitas, terbukti menurunkan tingkat korupsi di lingkungan pemerintahan.

Praktik *good governance* yang konsisten memiliki hubungan yang positif dengan meningkatnya kualitas layanan publik dan penurunan angka korupsi (Setyaningrum et al., 2017). Dengan demikian, sistem informasi seperti SIMAPAN BKPM memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap penerapan *good governance* dan pencapaian SDG 16 yang menekankan institusi yang efektif dan transparan.

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Teori Agensi dikenalkan oleh Jensen dkk. (1976) yang melihat organisasi sebagai kumpulan kontrak antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang dikategorikan sebagai prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemberi wewenang dan agen sebagai pihak yang menjalankan wewenang tersebut atas nama prinsipal. Dalam konteks sektor publik, masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah berperan sebagai agen yang menjalankan wewenang yang diberikan oleh prinsipal. Dalam teori agensi terdapat suatu konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Tidak selarasnya kepentingan tersebut menimbulkan tidak percayanya prinsipal kepada agen yang dipilihnya sehingga konflik tersebut dapat menimbulkan biaya agensi (Agency Cost) (Watt & Zimmerman. 2003) dalam (Ulum, 2011)

Good Governance

Good governance merupakan sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan negara yang kuat dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian (Nazsir, 2003).

Dalam sudut pandang pelayanan publik, *good governance* harus memiliki kriteria utama yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan (Putu & Widanti, 2022). Praktik *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi, akuntabilitas dan responsivitas menjadi tiga prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan yang kuat. Kepercayaan publik tidak hanya terbentuk oleh kebijakan, melainkan juga bagaimana pemerintah menjalankan pengelolaan yang baik, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pondasi yang penting dalam membangun kepercayaan masyarakat (Beshi & Kaur, 2020)

Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Sawir (2017) Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip dasar dalam pelaksanaan dan pemenuhan *good governance*. Secara konsep, transparansi dan akuntabilitas saling berhubungan. Tanpa adanya transparansi tidak akan ada akuntabilitas dan sebaliknya. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan, akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2018)

Transparansi dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pemerintahan (Setyaningrum dkk, 2017). Namun, penggunaan teknologi yang canggih dan mutakhir jika tidak diiringi dengan komitmen para pemimpin, maka transparansi dan akuntabilitas tidak akan terlaksana dengan maksimal. (Sumantri, 2023).

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah serangkaian komponen yang bekerja mengubah data transaksi keuangan menjadi informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu demi mendukung pengambilan keputusan, pengendalian internal, dan memonitoring akuntabilitas organisasi. (Romney dkk., 2012). Menurut Marina dkk., (2018) SIA merupakan suatu jaringan dari sebuah prosedur, formulir, catatan, dan alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh manajemen. SIA juga bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yang menggunakan sumber daya fisik yang terdiri atas komponen yang mentransformasikan data-data ekonomi menjadi data-data akuntansi yang dapat digunakan oleh pengguna SIA (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

Tujuan utama dari adanya SIA yaitu untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi agar menjadi sebuah informasi yang diperlukan, mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen, memastikan kontrol internal dalam rangka melindungi aset dan meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan, serta memfasilitasi kepatuhan terhadap peraturan. (Romney dkk., 2012).

METODE

Penelitian dilakukan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dimulai pada bulan Maret hingga Juli 2025 yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Timeline Pelaksanaan

Bulan	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Agenda	Penentuan Judul Penelitian	Penyusunan proposal penelitian	Pelaksanaan penelitian	Analisis data hasil penelitian	Penyusunan laporan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus karena peneliti mendapatkan data tanpa melalui proses statistika, melainkan dari hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi (Purwohedi, 2022). Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian eksploratif, pada dasarnya penelitian eksploratif digunakan untuk mengetahui secara mendalam mengenai suatu masalah atau situasi. Sehingga peneliti dapat menggambarkan tahapan desain penelitiannya dan menjelaskan secara terperinci setiap rumusan masalah penelitian yang diajukan (Purwohedi, 2022). Pendekatan studi kasus dipilih agar fenomena penerapan SIMAPAN BKPM sebagai sistem pengawasan anggaran dapat dianalisis secara mendalam dalam konteks yang nyata. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan beberapa informan, yaitu Kepala Bagian Keuangan, PPSPM, Verifikator, dan Administrator Keuangan. Data dianalisis dengan tiga tahapan analisis yaitu 1) Reduksi Data, 2) Tampilan Data, dan 3) Pengambilan Keputusan dan Verifikasi (Purwohedi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Data

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengembang dari SIMAPAN BKPM. Informasi didapatkan dengan cara wawancara melalui *platform Zoom Meetings* yang dilakukan pada bulan September 2025 bersama dengan Kepala Bagian Keuangan, Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar (PPSPM), Verifikator, dan Administrator Keuangan.

Penerapan SIMAPAN BKPM

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan data bahwa, SIMAPAN BKPM merupakan sebuah sistem yang hanya digunakan oleh Bagian Keuangan dengan tujuan untuk mendokumentasikan perjalanan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Satuan Kerja (Satker) ke Bagian Keuangan. Pengembangan sistem tersebut dirancang agar SPP dapat dipantau perkembangan perjalanannya, mulai dari penginputan berkas SPP dan berkas pendukung di Administrator Keuangan, lalu Verifikator, kemudian PPSPM, dan yang terakhir ke Administrator untuk pendokumentasian secara digital (*soft copy*).

Administrator Keuangan memiliki tugas menginput seluruh data berkas yang diberikan oleh satuan kerja, seperti Nomor SPP, data Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), satuan kerja asal, PIC (*person in-charge*) Verifikator, dan penginputan data perjalanan dinas (bila SPP tersebut untuk perjalanan dinas). Setelah melakukan penginputan, berkas diberikan kepada Verifikator untuk diperiksa. Verifikator memeriksa kelengkapan serta kesesuaian berkas terhadap peraturan yang berlaku seperti PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM). Jika nominal yang tertera tidak sesuai seperti melebihi SBM maka nominal yang dikeluarkan disesuaikan dengan yang tertera pada SBM. Jika dokumen yang diberikan kurang, maka akan dikembalikan ke satuan kerja untuk dilengkapi kembali dokumen yang kurang. Jika dokumen yang kurang sudah dilengkapi, maka akan dikirim kembali ke Administrator dan Verifikator, kemudian diperiksa kembali kesesuaiannya.

Dokumen yang sudah sesuai pada tahap verifikasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan oleh PPSPM. Sesuai dengan PMK No.107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. PPSPM bertugas untuk menguji dokumen yang diberikan oleh satuan kerja. Sehingga dokumen keuangan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diperiksa sebanyak 2x setelah menggunakan SIMAPAN BKPM.

Validitas dokumen atau penandatanganan dokumen masih menggunakan aplikasi SAKTI, karena pada dasarnya SIMAPAN BKPM dirancang dengan tujuan hanya untuk dokumentasi SPP. Namun, SIMAPAN BKPM sudah terintegrasi dengan SAKTI sehingga memudahkan validasi dokumen SPP menjadi SPM. Data nominal yang berada pada aplikasi SIMAPAN BKPM juga diambil dari SAKTI, sehingga tidak ada selisih nominal pada sistem yang digunakan baik SAKTI maupun SIMAPAN BKPM.

Tabel 2 Hasil Analisis Data

Kriteria <i>good governance</i>	Penerapan SIMAPAN BKPM	Hasil Analisis
Transparansi	SIMAPAN BKPM terintegrasi dengan aplikasi SAKTI	SAKTI merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk menunjang pemrosesan, pencatatan, dan pelaporan realisasi anggaran pemerintah, sehingga SIMAPAN BKPM yang terintegrasi dengan SAKTI menjadi sebuah sistem yang mendukung kembali transparansi yang sudah diberikan oleh SAKTI
Akuntabilitas	SIMAPAN BKPM menjadi sebuah sistem yang memonitoring perjalanan SPP dan membuat pemeriksaan SPP menjadi 2(dua) kali proses	Pada proses penggunaan SIMAPAN BKPM, dokumen SPP akan melewati Verifikator dan PPSPM yang keduanya bertugas untuk memeriksa dan menguji kebenaran, ketepatan, dan kesesuaian dokumen terhadap peraturan yang berlaku, sehingga pencairan anggaran akan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan bisa meminimalkan risiko <i>fraud</i>
Keterbukaan	SIMAPAN BKPM hanyalah sistem di internal kementerian	SIMAPAN BKPM tidak berkaitan dengan penyampaian informasi publik terkait anggaran walaupun SIMAPAN BKPM terintegrasi dengan SAKTI yang menyajikan pelaporan keuangan. Namun, SIMAPAN BKPM tidak berperan langsung terhadap keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sumber: Data diolah (2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa, SIMAPAN BKPM sudah memenuhi sebagian dari kriteria utama pemenuhan *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Namun, dikarenakan SIMAPAN BKPM merupakan sebuah sistem internal dan bukan suatu sistem yang berkaitan langsung dengan masyarakat, maka SIMAPAN BKPM belum memenuhi kriteria keterbukaan dalam *good governance*. SIMAPAN BKPM membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memenuhi komitmen dalam pemenuhan SDGs terutama SDG 16 salah satunya tentang membangun institusi yang kuat. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, J., As'ari, H., & Anjani, N. (2024). Pengelolaan Informasi Publik di Tinjau dari Perspektif Good Governance di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 432–448. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12786669>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Sistem Informasi & Pengendalian Internal*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indikator.co.id. (2024). *Tingkat kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik*. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2022). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). Public Governance dan Korupsi: Bukti Pengujian Dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 223–234. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.223-234>
- Marina, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi : Teori dan Praktikal*. UM Surabaya.
- Nazsir, N. (2003). *Good Governance*.
- Purwoheddi, U. (2022). *Metodologi Penelitian Prinsi dan Praktik*.
- Putu, N., & Widanti, T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1).
- Romney, M., Steinbart, P., Mula, J., McNamara, R., & Tonkin, T. (2012). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Pearson Australia.
- Sawir, M. (2017). *Konsep Akuntabilitas Publik*.
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). *Good Public Governance, Corruption and Public Service Quality: Indonesia Evidence*. <https://www.researchgate.net/publication/326253585>
- Sumantri, I. (2023). *Transparansi*.
- Ulum, A. S. (2011). *Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory*.
- UNDP. (2020). *Goal 16 Peace, Justice, and Strong Institutions*.